BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : SUARA PEMBARUAN
Subyek : Pembalakan Liar
Edisi : 15/September/2007
Hari : Sabtu
Halaman : 2

Pembalakan Liar di Riau Tetap Diproses

[JAKARTA] Polisi tetap memproses kasus pembalakan liar (*illegal logging*) di Riau yang melibatkan dua perusahaan besar Indonesia. Saat ini, polisi masih menunggu surat izin presiden untuk memeriksa para pejabat yang diduga terlibat. "Ini kan instruksi Presiden, jadi kami tetap menunggu," kata Kapolri Jenderal Sutanto kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat (14/9).

Dikatakan, walau Presiden membentuk tim baru untuk menangani pembalakan liar di Riau, tim yang dibentuk polisi tidak berhen-ti memproses penyidikan yang tengah berlangsung. "Tak ada hambatan dengan penyidikan, justru tim yang dibentuk Presiden memperlancar proses penyidikan kasus ini," kata Kapolri.

Ketika ditanya mengenai barang bukti saat ini masih ada di Riau, mantan Kapolda Jawa Timur itu menyatakan, barang bukti yang sedang diproses Polri tetap dalam posisi yang sama. Sementara yang sudah masuk pengadilan, menjadi kewenangan pengadilan.

Sutanto mengatakan, saat ini, polisi hanya melakukan proses dalam domain hukum. "Karena kami menilai ada kerusakan yang dilakukan dalam pemanfaatan secara ekonomi. Hasil hutan memang harus dimanfaatkan, kalau tidak masyarakat rugi, tapi tak boleh merusak, itu yang kami jaga," kata dia.

Sebelumnya anggota Komisi III DPR, Yasonna Laoly, mengatakan langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim gabungan (timgab) untuk mengatasi masalah pembalakan liar (*illegal logging*) di Provinsi Riau menunjukkan koordinasi dalam kabinet Yudhoyono lemah. Selain itu, upaya Presiden membentuk timgab juga sebenarnya sudah terlambat.

"Kapolri dan Menteri Kehutanan tidak ada koordinasi yang baik. Ya, ini bisa terjadi karena kurangnya kontrol dari Presiden sendiri. Seharusnya Presiden memikirkan dari awal permasalahan di Riau itu, sejak ada saling tuding antara pihak Polri dengan Menteri Kehutanan, MS Kaban. Ya, walau pun agak terlambat, kita tetap dukung langkah Presiden ini," kata dia.

Sebagaimana diberikan, dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) lintas bidang, Presiden Yudhoyono memerintahkan pembentukan timgab yang dipimpin Menko Polhukam Widodo AS dengan Wakil Ketua adalah Menko Perekonomian Boediono.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Timgab tersebut bekerja untuk mengumpulkan seluruh bahan dan data yang diperlukan dalam rangka merumuskan langkah-langkah penyelesaian. "Presiden menginstruksikan tim ini untuk segera bekerja dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Widodo (*SP*,7/9).

Laoly mengatakan, dalam menegakkan hukum kasus *illegal logging* di Riau, diharapkan tetap diperlukan jaminan keberlangsungan kegiatan ekonomi dan investasi. [E-8]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup